

BAB IV

ANALISIS KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MASA PEMERINTAH JOKO WIDODO TERHADAP *MELANESIAN SPEARHEAD GROUP (MSG)*

Pada bab IV ini akan mencermati alasan-alasan serta tindakan yang diambil oleh Indonesia bergabung dengan salah satu forum di Pasifik Selatan, yaitu *Melanesian Spearhead Group* berdasarkan hasil wawancara, kajian, kebijakan, dan perkiraan yang dibahas dalam tesis ini. Kajian ini tetanam dalam konsep kepentingan Indonesia yang tercantum dalam kebijakan politik luar negeri. Bab ini akan membahas strategi Indonesia dalam mengembangkan sayap di wilayah pasifik selatan dan memperoleh keuntungan yang dibutuhkan untuk memanfaatkan potensi politik, strategi, dan ekonomi melalui kerjasama di masa depan.

Dalam menganalisa kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia ini penulis akan menjelaskan berdasar pada kerangka teori serta konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi penyebab mengapa pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk menerima bantuan dan tawaran kerjasama dari pihak luar untuk menanggulangi permasalahan ini

A. Pengambilan Kebijakan oleh Pemerintah Indonesia untuk bergabung di dalam *Melanesian Spearhead Group (MSG)*

Dalam pengambilan kebijakan luar negeri, setiap orang melakukan tindakan berdasarkan pada apa yang diketahui. Setiap

pandangan yang disampaikan oleh seseorang pada suatu situasi tergantung pada bagaimana ia mendefinisikan situasi itu. Para pembuat kebijakan dipengaruhi oleh berbagai proses psikologi yang telah mempengaruhi sebuah persepsi, contohnya untuk merasionalisasikan tindakan, untuk mempertahankan pendapat sendiri, untuk mengurangi kecemasan, dan lain-lain. Pada awalnya, nilai dan keyakinan seseorang dapat membantu orang tersebut dalam menetapkan arah perhatiannya, yaitu menentukan apa stimulusnya, apa yang dilihat serta apa yang diperhatikan. Kemudian berdasarkan sikap dan citra yang telah dipegangnya selama ini, stimulus itu diinterpretasikan. Setiap orang hanya memperhatikan sebagian saja dari dunia sekitarnya, dan setiap orang memiliki serangkaian citra yang berbeda-beda untuk menginterpretasikan informasi yang diperoleh.

Politik luar negeri merupakan refleksi dari realitas yang terjadi di dalam negeri serta juga dipengaruhi oleh situasi internasional. Hal ini diperkuat oleh Rosenau yang menjelaskan pengkajian kebijakan luar negeri suatu negara akan menghadapi situasi yang kompleks meliputi kebutuhan eksternal dan kehidupan internal.¹ Berarti kedua kebutuhan tersebut sangat mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri. Adanya faktor internal merupakan tempat pertautan kepentingan nasional, sedangkan eksternal merupakan tempat dimana negara dapat mengartikulasikan kepentingan nasional sehingga kepentingan tersebut dapat tercapai. Setiap negara yang berdaulat memiliki kebijakan yang mengatur hubungannya dengan dunia internasional, baik dengan negara maupun komunitas internasional lainnya. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari politik luar negeri yang dijalankan negara dan merupakan

¹Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, 2005, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya

pencerminan dari kepentingan nasionalnya. Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat juga menjalankan politik luar negeri yang senantiasa berkembang disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri dan perubahan situasi internasional. Dengan semakin berkembangnya Indonesia, kebijakan politik luar negeri yang muncul juga semakin kompleks. Karena bagaimanapun juga dengan perubahan-perubahan kapabilitas Negara dan stabilitas politik dalam negeri memberikan pengaruh yang sangat besar demi tercapainya tujuan tersebut. Namun, terlihat jelas, tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika politik domestik, politik luar negeri Indonesia sekarang ini juga dipengaruhi oleh fenomena-fenomena yang muncul dalam hubungan internasional. Untuk itu penulis akan menjabarkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengambilan kebijakan politik luar negeri Indonesia untuk berkiprah di wilayah Pasifik Selatan.

Politik luar negeri Indonesia yang tidak terlepas dari pengaruh beberapa faktor, antara lain posisi geografis yang strategis, yaitu posisi silang antara dua benua dan dua samudra; potensi sumber daya alam dan manusia berikut susunan demografi; dan sistem sosial-politik yang sangat mempengaruhi sikap, cara pandang serta cara memposisikan diri di panggung internasional. Beberapa faktor yang menjadi dasar pertimbangan keterlibatan Indonesia di dalam forum pasifik adalah yang pertama faktor sosial budaya, hal ini terlihat dari persamaan ras Melanesia yang ada di Indonesia dan juga yang ada di Pasifik. Yang kedua adalah faktor geografi, dimana selain ASEAN, Indonesia juga memiliki tetangga yang serupa yang terletak di bagian timur Indonesia. Kemudian faktor ekonomi dan politik, dimana Indonesia saat ini sedang menebar bibit untuk dapat di ambil hasilnya dikemudian hari. Jika dilihat dari sisi ekonomi, tingkat ekonomi Indonesia jelas lebih

tinggi dari pada negara-negara anggota lainnya. Oleh sebab itu, saat ini Indonesia masih lebih banyak memberi daripada menerima. Berbicara mengenai politik, Indonesia ingin mejadi negara berpengaruh di wilayah Pasifik Selatan, seperti Indonesia yang telah berpengaruh di Asia Tenggara.

Terkait isu-isu yang terjadi di Papua maka Indonesia merasa untuk meredam isu-isu yang saat ini telah menjadi internasional. Dalam perkembangannya dari masa ke masa, faktor internal yang terjadi masih dengan hal yang sama. Penulis melihat bahwa permasalahan yang sering disuarakan datang dari permasalahan mengenai kelompok separatis Papua yang ingin memisahkan diri dari NKRI dengan meyuarkan isu-isu yang telah menjadi isu internasional. Kelompok ini datang dari dalam wilayah Indonesia, dimana mereka merasa tidak adil dengan perlakuan pemerintah Indonesia terhadap masyarakat setempat.

Dengan bergabungnya Indonesia di dalam *Melanesian Spearhead Group*, kebijakan pemerintah terkait kerjasama luar negeri di dalam forum internasional dan sub-regional, dapat kita lihat sesuai dengan penjelasan yang telah penulis uraikan diatas bahwa mengenai kebijakan politik luar negeri oleh Rosenau yang didasari oleh faktor internal dan eksternal, dimana dengan bergabungnya Indonesia di dalam forum Pasifik Selatan ini, pemerintah melalui presiden Joko Widodo melihat beberapa faktor yang bisa dikembangkan dan juga menjadi keuntungan bagi Indonesia di kemudian hari.

Keuntungan dengan bergabungnya Indonesia ini terutama pada kerja sama dibidang ekonomi mengingat nilai perdagangan Indonesia dengan negara-negara *Melanesian Spearhead Group* sampai saat ini cukup besar. Artinya bahwa keterlibatan Indonesia menjadi anggota *Melanesian Spearhead Group* dapat membantu untuk meningkatkan

perekonomian masyarakat di negara-negara pasifik. Selain itu, keberadaan Indonesia sebagai anggota *Melanesian Spearhead Group* ini juga akan menguntungkan dalam membangun hubungan diplomasi, terutama terkait isu Papua Merdeka. Pemerintah akan lebih mudah memberikan pemahaman bahwa Indonesia sangat peduli dengan masyarakat Melanesia, terutama yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Pemahaman ini tentu dilakukan dalam bentuk pembentukan kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita pun telah menyadari bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia di Papua dalam keadaan baik-baik saja, masyarakat menjalankan aktivitasnya secara normal dan kondusif. Roda pemerintahan dan intervensi kebijakan yang dilakukan pemerintah pun berjalan lancar. Sehingga ketika ada aksi masyarakat yang mengatasnamakan rakyat Papua ingin merdeka tentu perlu dipertanyakan, apakah benar itu sesuai dengan keinginan masyarakat disana. Untuk itu, tergabungnya Indonesia sebagai anggota *Melanesian Spearhead Group* diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat di dunia terutama rakyat Melanesian bahwa Indonesia masih sangat mampu mengelola konflik rumah tangganya sendiri.

B. Strategi Pendekatan Indonesia di Kawasan Pasifik Selatan

Dalam mencapai kepentingannya, Indonesia tentunya mengalami dinamika yang beragam dalam hubungannya dengan negara-negara lain dari waktu ke waktu. Regional Pasifik adalah salah satu regional yang terdekat dan tidak kalah penting dari ASEAN yang merupakan lingkaran kosentris politik luar negeri Indonesia. Dimana hal ini mengindikasikan bahwa wilayah pasifik

strategis dalam kaitannya dengan politik luar negeri Indonesia. Faktor geografis yang dekat menimbulkan keinginan Indonesia dalam menjaga hubungannya dengan negara-negara di regional dalam kestabilan regional.

Pemerintah Indonesia melalui presiden Joko Widodo lebih mempererat hubungan kerjasama dengan negara-negara di Pasifik sebagai bentuk mempererat hubungan khususnya dalam bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya. Tentunya hal tersebut dilakukan dalam menjaga hubungan dengan negara-negara di regional Pasifik dengan menjadi mitra dialog di *Pacific Islands Forum* . Selain itu, Indonesia juga mulai melebarkan sayapnya di salah satu forum sub-regional *Melanesian Spearhead Group*. Bergabungnya Indonesia ke dalam *Melanesian Spearhead Group* tentunya tidak lepas dari keterkaitannya dengan isu-isu separatis di Papua. Berbagai upaya dilakukan Indonesia untuk mempertahankan Papua sebagai bagian dari Indonesia. Di lain sisi, kelompok separatis Papua juga mengupayakan pemisahan diri sesegera mungkin dari Indonesia. Upaya pemisahan Papua dilakukan melalui perlawanan di dalam negeri melalui sayap militer gerakan separatis dan melalui aksi-aksi non kekerasan, melalui jalur politik dan internasionalisasi isu Papua.

Babak baru internasionalisasi itu dimulai dengan dibukanya kantor organisasi *Free West Papua* di Oxford Inggris pada April 2013; diikuti pembukaan kantor di Belanda, Australia dan negara Melanesia; lalu pembukaan kantor ULMWP di Vanuatu dan Solomon *Island*; kemudian klaim peresmian kantor ULMWP di Wamena. Semua itu merupakan bagian dari internasionalisasi isu Papua. Kampanye yang selalu diangkat adalah pelanggaran HAM, penindasan dan

ketidakadilan yang diderita rakyat Papua. Dan Kemudian dengan terus mendesakkan referendum penentuan nasib sendiri untuk rakyat Papua. Internasionalisasi isu Papua adalah upaya untuk mendesakkan referendum ini. Strategi referendum Papua melalui Dewan PBB itu terlihat sama seperti strategi pemisahan Timor Timur dari Indonesia.

Bergabungnya Indonesia dengan *Melanesian Spearhead Group* bukan tanpa tujuan. Tujuan Indonesia antara lain meliputi keikutsertaan Indonesia dalam *Melanesian Spearhead Group* merupakan bagian dari upaya untuk mereposisi kebijakan luar negeri Indonesia yang selama ini lebih memberi penekanan kepada negara-negara ASEAN dan negara Barat, menuju *look east policy*. Kehadiran Indonesia dalam *Melanesian Spearhead Group* merupakan bagian dari upaya untuk mendekatkan diri dengan negara-negara di kawasan Pasifik, dan keikutsertaan Indonesia sebagai mitra dialog *Melanesian Spearhead Group* dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional sekaligus dapat dimanfaatkan untuk menggalang dukungan terhadap Indonesia dalam forum internasional. Ada beberapa strategi yang digunakan Indonesia untuk melakukan pendekatan di wilayah Pasifik Selatan, yaitu:

1. Look East Policy

Secara diplomatik hubungan Indonesia dengan negara-negara di Pasifik Selatan tidak berkembang pesat seperti hubungan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, bahkan ASEAN menempati urutan prioritas tertinggi dalam lingkaran konsentrasi politik luar negeri Indonesia. Hal ini memberikan konsekuensi bagi Indonesia untuk berperan aktif dalam berbagai kegiatan ASEAN,

bahkan karena faktor geografis dan jumlah penduduknya yang besar, dipandang sebagai “saudara tua” oleh beberapa anggota ASEAN.

Faktor kesamaan latar belakang dan kesamaan geografis membuat Indonesia mengkonsiderasi ASEAN sebagai mitranya yang paling dekat dalam menyusun politik luar negerinya. Namun selain ASEAN, Indonesia sudah seharusnya turut mengkonsiderasi keberadaan negara-negara Pasifik. Faktor kedekatan geografis dan letak antara Indonesia dengan negara-negara Pasifik yang strategis membuat Indonesia merasa perlu untuk melakukan kerjasama lebih lanjut dengan negara-negara Pasifik secara regional. Namun, meskipun Indonesia telah aktif dalam forum-forum regional Pasifik, hubungan antara Indonesia dengan negara-negara Pasifik secara spesifik tetap mengalami dinamika naik dan turun. Dinamika ini tidak terlepas dari fluktuasi politik domestik yang kemudian turut mempengaruhi perilaku Indonesia di lingkungan bilateral dan regional.

Apabila ditinjau melalui perspektif regional, Ali Alatas, salah seorang mantan Menteri Luar Negeri Indonesia menyatakan bahwa kepentingan utama Indonesia dalam berhubungan dengan kawasan Pasifik adalah untuk menjaga kestabilan Pasifik Selatan dari ancaman yang mungkin timbul dari kehadiran dua poros besar dunia paska Perang Dunia II, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet.² Kestabilan tersebut penting bagi Indonesia untuk menjaga status quo-nya sebagai sebuah negara yang baru saja terdekolonisasi dan merdeka. Selain itu, dibawah kepemimpinan Joko Widodo, Indonesia sangat perlu untuk menunjukkan eksistensi dan konsistensinya di kawasan Pasifik Selatan

² Usman, Asnani, 1994. “Indonesia dan Pasifik Selatan”, dalam Bantarto Bandoro (ed.), *Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru*. Jakarta: CSIS.

dalam menangani masalah-masalah regional. Pertanggungjawaban tersebut diimplementasikan dalam kerangka persahabatan dan kerjasama pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan Pasifik. Seiring berjalannya waktu, kawasan Pasifik memiliki dinamika yang cukup tinggi, baik dalam bidang perekonomian, jasa, ide dan kultur, bahkan perpolitikan. Kondisi ini tidak dapat dijalankan dengan baik jika tidak ada rasa kepercayaan dan stabilitas dalam kawasan Pasifik itu sendiri.

Wilayah Pasifik bersifat cukup strategis dalam kaitannya dengan politik luar negeri yang dijalankan Indonesia. Adanya faktor kedekatan jarak secara geografis, membuat Indonesia menjaga hubungan baik dengan negara-negara di Pasifik dengan tujuan utama menjaga stabilitas keamanan regional dan nasional karena letak wilayah Pasifik dan Indonesia yang strategis. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut maka dijalankan beberapa kebijakan dalam meningkatkan hubungan non-politik, sekaligus mendorong peningkatan *people to people interaction* (link) sebagai landasan strategis dalam hubungan baik pada masa mendatang, serta meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam berbagai kerjasama bilateral dan regional untuk mendukung kerjasama multilateral.

Sebagaimana dipahami bahwa sebuah kebijakan politik luar negeri sebagaimana halnya sebuah produk kebijakan dari sebuah negara, dirumuskan melalui sebuah mekanisme atau proses sesuai dengan mekanisme pada pemerintahan tersebut. Indonesia telah meningkatkan hubungan persahabatan dengan negara-negara kepulauan Pasifik, dengan kerangka kebijakan "*Look East Policy*", dimana kebijakan ini merupakan komponen strategis dalam kebijakan luar

negeri Indonesia atas forum di wilayah Pasifik Selatan. Hal ini ditunjukkan melalui peningkatan hubungan yang signifikan dengan negara-negara yang tergabung dalam *Melanesian Spearhead Group* (MSG), *Pacific Island Forum* (PIF), serta *Pacific Island Development*. Pentingnya wilayah Pasifik Selatan bagi Indonesia telah dijelaskan di dalam kerangka *look east policy* ada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Wilayah Pasifik Selatan yang selama ini hanya dilihat sebelah mata, namun seiring dengan berkembangnya Indonesia sebagai *middle power*, sudah seharusnya Indonesia sebagai negara besar meningkatkan *engagement*.³

Melihat lebih lanjut mengenai implementasi dari *look east policy*, Indonesia telah meningkatkan hubungan persahabatan dengan negara-negara kepulauan Pasifik, dengan kerangka kebijakan "*Look east Diplomacy*". Hal ini ditunjukkan melalui peningkatan hubungan yang signifikan dengan negara-negara yang tergabung dalam *Melanesian Spearhead Group*, *Pacific Island Forum*, serta *Pacific Island Development*. Sebagai negara kepulauan, Indonesia merasa memiliki kesamaan tantangan dengan negara-negara anggota *Melanesian Spearhead Group* yaitu bencana alam, perubahan iklim global, kesejahteraan ekonomi, peningkatan keamanan regional, dan upaya penanganan kejahatan transnasional. Selama berstatus *observer*, Indonesia pernah memberikan dana bantuan pembangunan *Regional Police Academy Melanesian Spearhead Group* sebesar USD 500.000 pada Januari 2014. Sampai dengan pertengahan tahun 2016 Indonesia telah mengadakan 130 kerjasama teknis yang melibatkan 583 peserta

³ Wawancara dengan narasumber Bapak Heri Syarifuddin, selaku Ketua Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 27 September 2016.

dari negara-negara Pasifik.⁴ Kerjasama teknik ini diwujudkan dalam program pengembangan kapasitas pada bidang proses pengembangan produk perikanan, pembuatan kerajinan tangan, kesenian dan budaya melalui beasiswa seni dan budaya Indonesia (BSBI), *diplomatic course*, jurnalisme, dan pelatihan pengembangan sumber daya manusia.

Sebagai negara *middle power* (kekuatan tengah) dengan penduduk kurang lebih 250 juta orang, demokrasi terbesar ketiga di dunia, penduduk Muslim terbesar di dunia, negara terbesar di ASEAN, anggota G-20, maka Indonesia akan terus memainkan perannya baik di kawasan maupun di dunia. ASEAN tetap merupakan prioritas politik luar negeri Indonesia. Indonesia juga menginginkan satu tatanan dunia yang demokratis, semakin sempitnya gap kemakmuran antar negara, pergaulan dunia yang saling menghormati dan dunia yang aman dan stabil. Sesuai dengan mandat Konstitusi, maka Indonesia tetap akan memberikan kontribusi dan mengambil peran penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia⁵ Indonesia akan terus memainkan peran sebagai *middle power*, dengan menempatkan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN sebagai prioritas politik luar negeri. Memang benar bahwa *corner stone* Indonesia adalah ASEAN, namun tidak boleh dikesampingkan bahwa di wilayah regional, Indonesia masih memiliki tetangga secara kultural yang dekat dengan Indonesia.

Faktor kedekatan geografis dan letak antara Indonesia dengan negara-negara Pasifik yang strategis membuat Indonesia merasa perlu

⁴ Wawancara dengan narasumber Bapak Adirio Arianto selaku Dosen UPN Veteran Jakarta, 15 September 2016.

⁵ Kementerian Luar Negeri Indonesia, *Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Indonesia tahun 2015*.

untuk melakukan kerjasama lebih lanjut dengan negara-negara Pasifik secara regional. Namun, meskipun Indonesia telah aktif dalam forum-forum regional Pasifik, hubungan antara Indonesia dengan negara-negara Pasifik secara spesifik tetap mengalami dinamika naik dan turun. Dinamika ini tidak terlepas dari fluktuasi politik domestik yang kemudian turut mempengaruhi perilaku Indonesia di lingkungan bilateral dan regional.⁶ Pasifik Selatan memiliki keterkaitan sejarah dan budaya dengan Indonesia, dimana kesamaan ras Melanesia yang berada di wilayah timur Indonesia menjadi identitas khas yang sering ditonjolkan. Persamaan budaya merupakan salah satu alasan utama Indonesia untuk memasuki wilayah Pasifik Selatan. Indonesia membuat terobosan baru dalam membangun hubungan kerjasama antar negara. Jika kerjasama selama ini lebih fokus dengan negara-negara besar atau negara Utara, maka kali ini Indonesia merubah arah dengan menjajaki negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Papua Nugini, Fiji, Vanuatu, Kepulauan Solomon, dan sejumlah negara pasifik lainnya menjadi target kerjasama yang hendak dibangkitkan. Salah satu misi yang dibawa adalah persoalan Papua. Pasifik Selatan menjadi penting ketika berbicara mengenai Papua.

Untuk memberikan perhatian lebih kepada wilayah Pasifik Selatan, Indonesia harus mengubah pandangannya dari barat ke timur. Hal ini dianggap penting untuk menunjang peran aktif Indonesia di wilayah tersebut. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan kurangnya perhatian Indonesia terhadap wilayah Pasifik Selatan. Pertama, secara geopolitik kawasan Pasifik Selatan ini terletak di “halaman belakang”,

⁶ Wawancara dengan narasumber Bapak Laode Muhammad Fathun selaku Dosen UPN Veteran Jakarta, 15 September 2016.

sehingga tidak banyak mendapat perhatian dari pengambil kebijakan maupun rakyat Indonesia pada umumnya. Dibandingkan dengan wilayah Asia Tenggara, yang secara geopolitik menjadi “halaman depan” negara Indonesia. Untuk itu, Indonesia harus mengubah halaman belakang menjadi halaman depan. Kedua, sebagai kelanjutan faktor pertama, menempatkan Pasifik Selatan bukan sebagai prioritas Indonesia dalam melakukan hubungan diplomatik. Menurut Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang pernah dimiliki Indonesia, Pasifik Selatan menempati urutan kedua dalam prioritas politik luar negeri Indonesia. Perhatian Indonesia ke Pasifik Selatan sangat timpang di bandingkan dengan Asia Pasifik. Ketiga, wilayah Oseania memiliki kemampuan ekonomi yang kecil, sehingga hampir tidak ada keuntungan yang diperoleh Indonesia jika bekerjasama dengan wilayah-wilayah tersebut, walaupun sebenarnya negara-negara Pasifik memiliki Zona Ekonomi Eksklusif yang sangat luas yang memungkinkan negara-negara tersebut menggali sumber-sumber kekayaan lautnya. Selain kemampuan ekonominya yang kecil, berbagai kendala yang dihadapi negara-negara kepulauan di Pasifik menjadi penghambat pula bagi pengembangan lebih jauh hubungan yang saling menguntungkan antara Indonesia dengan negara-negara kawasan.

Sekalipun menempati prioritas kedua dalam lingkaran konsentris politik luar negeri Indonesia, hal tersebut tidak berarti bahwa Pasifik Selatan tidak penting bagi Indonesia. Pengembangan kerjasama sub-regional untuk menjalin hubungan yang lebih erat antara provinsi-provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, merupakan

satu dari arah diplomasi ekonomi Indonesia di wilayah timur.⁷ Dengan latar belakang dan kesamaan yang dimiliki di kawasan sub-regional dan pergerakan masyarakat yang melintas batas secara intens, kerjasama sub-regional diperlukan untuk mendorong dan membentuk kawasan pertumbuhan yang lebih fokus dan terarah.

2. Prosper Thy Neighbour

Peningkatan status Indonesia dari negara berkembang menjadi *middle income country* (MIC) dan anggota G-20, membantu Indonesia berperan dalam berbagai forum internasional guna mencapai target pembangunan nasional. Salah cara yang ditempuh adalah memberdayakan peran Indonesia sebagai negara pemberi bantuan kepada negara berkembang melalui kebijakan Kerja Sama Selatan Selatan (KSS). Kerja sama Selatan Selatan merupakan kerjasama pembangunan sesama negara berkembang untuk membangun kemandirian kolektif yang akan memperkuat posisi negara berkembang di forum internasional. Melalui KSS negara-negara berkembang diharapkan dapat saling membantu dan mengurangi ketergantungan kepada negara maju dalam mengejar ketertinggalannya. Keberlanjutan kebijakan luar negeri dijalankan dengan merujuk pada amanah Konstitusi dan cara pandang Indonesia atas posisi dan peran internasionalnya. Indonesia mengarahkan semua program KSS untuk kepentingan nasional, yang berdasarkan pertimbangan yang bersifat ekonomis, politis, dan pencitraan. Dengan menekankan pendekatan kemitraan melalui cara berbagi pengalaman. Setiap program peningkatan kapasitas yang diberikan kepada negara penerima

⁷ Wawancara dengan narasumber Bapak Heri Syarifuddin, selaku Ketua Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 27 September 2016.

hendaknya mampu mengubah persepsi atau kebijakan suatu negara terhadap Indonesia menjadi semakin positif, menguntungkan bagi kepentingan nasional Indonesia.

Bantuan Indonesia untuk negara berkembang pada umumnya diberikan dalam bentuk hibah dan berbagai bentuk pelatihan diantaranya di bidang pertanian, perikanan, good government serta UKM dengan mitra negara-negara berkembang di Asia, Afrika dan Pasifik Selatan. Dengan berperan aktif dalam KSS posisi Indonesia semakin diperhitungkan di dunia internasional sehingga mempermudah pencapaian kepentingan nasional. Kebijakan luar negeri merupakan refleksi dari politik dalam negeri dan bersumber pada kepentingan nasional. Pemerintah Indonesia mengubah prioritas negara tujuan penerima bantuan KSS dari Afrika ke Pasifik Selatan karena adanya kepentingan politik untuk mengatasi isu separatisme Papua dimana Kawasan Pasifik Selatan merupakan pendukung gerakan separatisme Papua. Dua organisasi yang sering didekati Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk mendapatkan dukungan adalah *Pacific Island Forum* dan *Melanesian Spearhead Group*.

Penulis melihat secara komposisi demografis beberapa etnis dari Indonesia Timur juga merupakan bagian dari Pasifik Selatan. Gerakan kemerdekaan Papua kerap menjadikan kawasan Pasifik Selatan sebagai ruang kampanye politik mencari dukungan untuk memerdekakan Papua dari NKRI. Oleh karena itu sebagai upaya tandingan Indonesia berupaya menumbuhkan hubungan baik dengan negara-negara di kawasan tersebut melalui kerja sama yang lebih erat. Dalam upaya ini program bantuan KSS menjadi andalan diplomasi Pemerintah Indonesia meraih simpati politik negara-negara di kawasan

Pasifik Selatan. Kemampuan diplomasi Indonesia sangat menentukan keberhasilan meredam isu Papua merdeka di Pasifik Selatan. Pemerintah Indonesia harus dapat “mengajak” negaranegara di kawasan tersebut untuk mendukung NKRI. Internasionalisasi masalah Papua oleh pihak yang tidak bertanggung jawab diharapkan bisa diatasi dengan cara menjalin hubungan harmonis dengan negara-negara di Pasifik Selatan dengan memperluas jejaring *friends of Indonesia*. Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan persahabatan, kerja sama, dan kemitraan dengan negara-negara di kawasan tersebut untuk meraih simpati dan kepercayaan pihak-pihak yang berlawanan politik. KSS menjadi alat *soft power diplomacy* Indonesia yang paling tepat terhadap kawasan pendukung Papua merdeka tersebut.

3. Regional Power Policy

Indonesia sudah menunjukkan diri sebagai regional power, bukan hanya di Asia Tenggara tetapi juga di Pasifik. Indonesia memperluas area berkiprahnya di wilayah Pasifik. Indonesia masuk kedalam *Melanesian Spearhead Group* sama seperti Australia yang ingin menjadi *regional power*. Namun perbedaannya adalah, Indonesia masuk ke dalam Pasifik Selatan dengan lebih smooth. Australia dan *New Zealand* yang memiliki kekuatan regional yang lebih besar dari Indonesia merupakan salah satu faktor potensial yang bisa menjadi penghambat Indonesia di wilayah Pasifik. Hal ini akan menjadi persaingan peran mengingat selama ini Indonesia hanya bermain di area Asia Tenggara, dan kemudian Indonesia mulai memembranikan diri untuk menjajal area Pasifik. Bisa dilihat dikemudian hari jika Indonesia tidak bergerak aktif, maka akan terjadi konflik kepentingan di wilayah tersebut. Oleh karenanya Indonesia mulai masuk ke wilayah Pasifik

dengan menggunakan *look east policy* sebagai *regional power*. Di abad ke-21, Indonesia terus membuka dan memperluas ruang gerak diplomasi dengan negara manapun sepanjang mendukung kepentingan nasional. Hal ini dikenal dengan Politik Luar Negeri ke segala arah (*all direction foreign policy*) dan Sejuta kawan, tanpa satupun lawan (*a million friends and zero enemy*). Hingga saat ini Indonesia juga terus melaksanakan politik bebas aktif yang selalu berorientasi pada peluang, memberikan nilai tambah bagi kepentingan nasional, dan menjadi bagian dari solusi permasalahan dunia.

Membendung penggalangan dukungan oleh gerakan separatisme Papua Barat di kawasan Melanesia merupakan salah satu kepentingan strategis Indonesia untuk mengajukan keanggotaan pada *Melanesian Spearhead Group*. Beberapa pernyataan para elit ULMWP menunjukkan harapan besar agar negara-negara anggota *Melanesian Spearhead Group* menjadi pendukung usaha kemerdekaan Papua Barat. Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2003 menyadari bahwa aktivis Papua aktif mencari dan menggalang dukungan internasional melalui jaringan *Melanesian Spearhead Group* yang dapat dikatakan memiliki potensi besar untuk menggalang identitas kolektif diantara bangsa Melanesia di Pasifik Barat Daya.⁸ Pemerintahan Papua Nugini memperlihatkan keberpihakan mereka kepada Indonesia dengan tidak mendukung Papua Barat. Konsistensi Papua Nugini untuk menghargai kedaulatan Indonesia merupakan keputusan yang menghendaki sikap yang sama dari pihak Indonesia. Hal ini menjadi penting terkait permasalahan gerakan separatism yang dihadapi Papua Nugini di

⁸ Baiq L.S.W. Wardhani. 2015. Kajian Asia Pasifik : *Politik Regionalisme dan Perlindungan Manusia di Pasifik Selatan Menghadapi Kepentingan Negara Besar dan Kejahatan Transnasional*, Malang: Intrans Publishing

wilayah Bougainville. Papua Nugini cenderung untuk melakukan kerjasama pengelolaan perbatasan dengan Indonesia.

C. *Relationship* Indonesia-Melanesia untuk Membangun Papua dalam Bingkai NKRI

Bergabungnya Indonesia ke dalam *Melanesian Spearhead Group* memang sudah menjadi sebuah keharusan, mengingat jumlah masyarakat Melanesia dengan jumlah terbesar berada di Indonesia. Status keanggotaan Indonesia sebagai *associate member* di dalam *Melanesian Spearhead Group* berbeda dengan ULMWP yang hanya sebagai *observer*. Perbedaan kriteria, sifat, dan hak-hak *observer* dan *associate member* tidak terlalu terpaut jauh. *Observer* hanya berhak mengikuti pertemuan jika mendapat undangan dari *Melanesian Spearhead Group*. Namun, *associate member* memiliki sedikit keistimewaan yaitu berhak meminta untuk diundang. Negara dalam keanggotaan asosiasi juga memiliki kewajiban untuk memberi kontribusi tahunan atau membayar iuran sesuai dengan jumlah yang disepakati. Kewajiban memberi kontribusi tahunan ini menyerupai kewajiban negara anggota. Dari perbedaan ini tampak bahwa Indonesia dapat memainkan hak dan kewajibannya seiring dengan perubahan status keanggotaan dalam *Melanesian Spearhead Group*. Indonesia memiliki keistimewaan jika dibandingkan dengan posisi ULMWP sebagai negara pengamat.⁹

Tidak dengan mudah Indonesia masuk kedalam forum ini melihat begitu banyak isu-isu terkait separatism yang disuarakan. Sudah sangat jelas jika Vanuatu menyuarakan ketidakberpihakannya terhadap Indonesia dengan selalu mendukung ULMWP untuk terus menindas

⁹ Wawancara dengan narasumber bernama rezha Fernando Wanggai, Kementerian Luar Negeri Indonesia, 29 September 2016

Indonesia. Lain halnya dengan Solomon *Island* yang sesaat berada di pihak Indonesia dan sesaat kemudian menentang Indonesia. Namun hal ini tidak menggoyahkan Indonesia di forum *Melanesian Spearhead Group*, mengingat ada dua negara besar yaitu Papua Nugini dan Fiji yang jelas memberikan dukungan penuh kepada Indonesia.

Setelah Papua bergabung dengan Indonesia pada tahun 1969, Jakarta gencar membangun Nasionalisme di Papua. Sangat disayangkan, pendekatan yang digunakan bersifat militeristik guna mewujudkan konsep NKRI sebagai harga mati. Kompleksitas perdebatan status politik integrasi Papua ke dalam NKRI hingga kini menjadi perdebatan tanpa ini. Hal inilah yang kemudian memunculkan berbagai isu-isu domestik yang dipergunakan oleh negara-negara yang mendukung Papua merdeka untuk kemudian di jadikan isu internasional. Terkait isu-isu yang selalu dilontarkan oleh Vanuatu dan Solomon, hal ini memperlihatkan adanya “sindrom negara kecil”. Negara-negara kecil, sebut saja Vanuatu dan Solomon, ingin mencari perhatian di dunia Internasional sehingga selalu menyuarakan isu-isu Papua untuk memojokkan posisi Indonesia. Isu adanya genosida, perampasan Hak Asasi Manusi (HAM), dan Penentu Pendapat Rakyat (Pepera) menjadi senjata bagi ULMWP dan juga negara pendukungnya untuk menghentikan langkah Indonesia di dalam forum *Melanesian Spearhead Group*.¹⁰

1. Genosida dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

¹⁰ Wawancara dengan narasumber bernama rezha Fernando Wanggai, Kementerian Luar Negeri Indonesia, 29 September 2016

Genocide dan pelanggaran HAM adalah isu terberat yang dilontarkan kepada Indonesia secara terus menerus yang telah menjadi isu internasional. Sebagaimana diketahui bahwa Organisasi negara-negara Melanesia telah memberikan tempat kepada Papua sebagai peninjau, dan isu pelanggaran HAM di Papua menjadi isu yang menjadi perjuangan di dunia internasional. Pada titik inilah, diplomasi Pasifik Selatan dipandang mendesak.

Pemberitaan media kembali diwarnai permasalahan penangkapan dua jurnalis asing asal Perancis akibat penyalahgunaan visa. Thomas Dandois dan Valentine Bourrat hanya memiliki visa turis, namun melakukan kegiatan jurnalis di Wamena, Papua. Pihak keamanan setempat menyebut keduanya dapat menimbulkan instabilitas keamanan di Papua. Penangkapan tersebut menimbulkan reaksi pro dan kontra dari beberapa kalangan. Tuntutan terhadap pembebasan kedua jurnalis Perancis tersebut tentunya tidak mudah untuk dipenuhi, karena permasalahan ini bukan hanya menyangkut persoalan pers. Permasalahan ini menyangkut kepentingan dan kewenangan negara untuk dapat mengontrol dan memonitor kegiatan-kegiatan asing yang dianggap dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional. Kekhawatiran akan adanya indikasi-indikasi untuk memprovokasi masyarakat Papua dengan pemerintah menjadi deteksi dini bagi pihak keamanan setempat. Sehingga persatuan dan kesatuan, serta keutuhan bangsa Indonesia sebagai negara berdaulat tidak akan mudah dirongrong oleh kepentingan asing.

Pemerintah telah mengedepankan proses hukum yang berlaku, sehingga pertanyaan-pertanyaan atau rumors yang terkait dengan jurnalis dari Perancis yang konon katanya identitas keimigrasiannya

ada yang dipertanyakan tersebut dapat dituntaskan jika kasus hukum dihormati semua pihak, termasuk Kedubes Perancis yang ada di Jakarta. Karena penulis yakin, jika ada jurnalis dari Indonesia yang tertangkap di negara lain karena melakukan pelanggaran misalnya pasti juga akan diproses secara hukum oleh negara tersebut. Perjalanan dua orang jurnalis dari Perancis tersebut juga diwarnai dengan "beberapa kebohongan", karena sebenarnya pemerintah Indonesia cukup terbuka kepada jurnalis asing untuk melakukan peliputan di Papua atau Papua Barat, asalkan mereka memasuki wilayah tersebut secara "terhormat dan tidak berbohong" serta tidak melakukan aktivitas apapun kecuali aktivitas jurnalistik agar tidak dideportasi.

Isu genosida dan HAM menjadi isu utama yang selalu diusung oleh kelompok-kelompok yang tidak pro pembangunan dengan Indonesia. Fakta-faktanya adalah tidak benar dan banyak terjadi manipulasi yang menunjukkan bahwa Indonesia telah melakukan hal-hal tersebut. Kelompok-kelompok separatis sudah terlalu banyak memberitakan isu-isu kebohongan yang luar biasa dan melakukan banyak manipulasi.¹¹ Sejumlah organisasi di Papua dan Papua Barat tampaknya terus menerus melakukan manuver politiknya untuk menginternasionalisasi masalah Papua dengan menjadikan isu pelanggaran HAM di Papua Barat dan Papua sebagai isu sentralnya, walaupun konon kalangan aktivis Papua ini juga tidak dapat memberikan bukti-bukti yang kuat telah terjadi pelanggaran HAM. Penulis melihat bahwa bagaimanapun juga, pers di Papua dan Papua Barat memiliki peran signifikan untuk menjaga perdamaian dan

¹¹ Wawancara dengan Bapak Reza Wirakara, Direktorat Kerjasama Intra Kawasan Aspasaf, Kasubdi II. Menangani isu-isu kerjasama Indonesia di Kawasan Pasifik Selatan, terkhusus organisasi sub-regional. 27 September 2016

jalannya pembangunan di Papua, termasuk integrasi Papua dalam NKRI dengan mengedepankan jurnalisme damai, bukan jurnalisme kebohongan, agitatif dan provokatif. Aksi dilakukan dalam rangka mendukung ULMWP masuk menjadi anggota penuh Melanesian Spearhead Group yang merupakan sebuah forum diplomatik di Pasifik Selatan.

2. Penentu Pendapat Rakyat (PEPERA)

Wilayah Papua yang kaya akan sumberdaya alam terutama tambang tidak menjadikan masyarakat lokal Papua memiliki kehidupan ekonomi yang baik. Masalah ekonomi menjadi salah satu faktor pemicu bertahannya gerakan separatism di Papua. Kompleksitas permasalahan di Papua sangat tinggi karena secara nyata daerah tersebut sangat labil terkena pengaruh negatif akibat perkembangan politik dan keamanan di dalam negeri. Persoalan di Papua berawal dari adanya kelompok masyarakat yang ingin menentukan nasib sendiri. Gerakan disintegrasi terjadi sejak pemerintah kolonial Belanda meninggalkan Indonesia. Faktor sejarah terkait proses integrasi ke dalam wilayah Indonesia masih menyisakan masalah. Hingga saat ini sebagian besar masyarakat Papua masih menganggap proses Gerakan Penentu Pendapat Rakyat (Pepera) tidak sesuai hukum internasional. Sesuai kesepakatan dalam *New York Agreement*, setiap rakyat Papua diberikan kesempatan untuk memberikan hak suaranya melalui mekanisme *one man one vote* untuk memilih integrasi ke Indonesia. Dalam proses tersebut, masyarakat Papua meragukan keabsahan hasil karena tidak semua masyarakat diikutsertakan. Masalah diperparah dengan kurangnya daya tawar dari kalangan pemimpin Papua baik di lembaga negara maupun di tengah masyarakat sipil dalam mempengaruhi kebijakan Jakarta. Kekecewaan

masyarakat Papua karena tidak dilibatkan dalam perjanjian *New York* menjadi kekecewaan historis dari masyarakat Papua terhadap Indonesia. Mereka menganggap bahwa telah terjadi pembohongan dalam peristiwa Pepera yang kemudian menjadi awal gerakan disintegrasi di Papua. Hal ini memunculkan kelompok dengan nama Organisasi Papua Merdeka (OPM).

D. Indonesia Sebagai *Main Actor* dalam Pengambilan Kebijakan untuk Bergabung dalam *Melanesian Spearhead Group* (MSG)

Sebagai aktor utama, negara berkewajiban mempertahankan kepentingan nasionalnya dalam kancah politik internasional. Negara dalam konteks ini diasumsikan sebagai entitas yang bersifat tunggal dan rasional. Maksudnya adalah dalam tataran negara, perbedaan pandangan politis telah diselesaikan hingga menghasilkan satu suara. Sedangkan negara dianggap rasional karena mampu mengkalkulasikan bagaimana cara mencapai kepentingan agar mendapat hasil maksimal. Graham T. Allison berpendapat bahwa suatu proses pengambilan keputusan akan melewati tahapan penentuan tujuan, alternatif/opsi, konsekuensi, dan pilihan keputusan. Di mana keputusan yang dibuat merupakan suatu pilihan rasional yang telah didasarkan pada pertimbangan rasional/intelektual dan kalkulasi untung rugi sehingga diyakini menghasilkan keputusan yang matang, tepat, dan prudent. Penulis menggunakan *Actor Rational* dengan pendekatan realisme untuk melihat kebijakan politik luar negeri Indonesia yang kemudian akan menunjukkan alasan tergabungnya Indonesia di dalam *Melanesian Spearhead Group*. Penulis melihat bahwa realis juga memusatkan perhatian pada potensi konflik yang ada di antara aktor negara, dalam

rangka memperhatikan atau menjaga stabilitas internasional, mengantisipasi kemungkinan kegagalan upaya penjagaan stabilitas, memperhitungkan manfaat dari tindakan paksaan sebagai salah satu cara pemecahan terhadap perselisihan, dan memberikan perlindungan terhadap tindakan pelanggaran wilayah perbatasan. Oleh karena itu, *power* adalah konsep kunci dalam hal ini. Dasar Normatif realisme adalah keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara: ini merupakan nilai-nilai yang menggerakkan doktrin kaum realis dan kebijakan luar negeri kaum realis.

Realisme merupakan teori yang menyatakan bahwa negara adalah satu-satunya aktor dalam hubungan internasional. Setiap aktivitas interaksi aktor Hubungan Internasional harus dikaitkan dengan aktor negara. Sama halnya dengan aktor rasional yang menjadikan Negara sebagai aktor utama dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, penulis melihat Indonesia sebagai aktor utama dalam pengambilan kebijakan politik luar negeri. Keputusan Indonesia akhirnya memutuskan untuk bergabung kedalam forum Pasifik Selatan karena Indonesia merasa percaya diri dengan *power* yang dimiliki sebagai Negara yang berpengaruh di wilayah Asia Tenggara. Melihat hal tersebut, Indonesia mulai memberikan perhatian lebih kepada wilayah Pasifik Selatan. Di bandingkan dengan negara-negara di wilayah Pasifik Selatan, Indonesia memiliki keunggulan dari segi ekonomi, luas Negara, dan pengaruh politik yang kuat. Untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara yang berpengaruh di wilayah Pasifik Selatan, Indonesia masuk dengan cara yang *smooth*. Dalam hal ini Indonesia menggunakan *soft power* dengan cara diplomasi.

Dengan mengedepankan identitas sebagai Negara kepulauan dalam pelaksanaan diplomasi dan membangun kerjasama internasional

merupakan salah satu tujuan kebijakan politik luar negeri Indonesia pada era Joko Widodo. Meningkatkan peran global melalui diplomasi *middle power* yang eksis dan berkontribusi bagi dunia Internasional yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional dan kekuatan global secara selektif dengan memberikan prioritas kepada permasalahan yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan Indonesia. Arah kebijakan luar negeri Indonesia pada era Joko Widodo saat ini adalah diplomasi ekonomi dan pilar ekonomi menjadi salah satu prioritas diplomasi luar negeri Indonesia. Kapasitas diplomasi Indonesia dalam hal ekonomi ini sangat membantu Indonesia untuk berkiprah di wilayah Pasifik Selatan. Penulis mengatakan demikian karena diplomasi ekonomi ini bertujuan untuk menopang kemandirian ekonomi nasional dan juga untuk secara internasional. Dikatakan secara internasional karena dengan tingginya tingkat ekonomi Indonesia di bandingkan dengan Negara-negara di kawasan pasifik Selatan, maka Indonesia bias memanfaatkan hal ini untuk memberikan bantuan kepada mereka.

Terkait isu-isu yang sering disuarakan oleh kelompok separatis kemerdekaan Papua, hal ini mendorong Indonesia untuk meningkatkan kapasitas diplomasi Indonesia. Peningkatan kapasitas diplomasi Indonesia di katakana cukup berani dengan melakukan sesuatu yang berbeda yang akan menjadikan Indonesia sebagai Negara yang memiliki wibawa dikancah internasional. Kepercayaan diri Indonesia yang tinggi terlihat pada siding PBB di *New York* pada September 2016 lalu, dimana Nara Rakhmatia yang merupakan seorang diplomat muda Indonesia mencuri perhatian dunia dalam siding tersebut. Dalam siding tersebut terdapat enam Negara kepulauan yang ada di Pasifik yaitu Vanuatu, Solomon *Island*, Tonga, Nauru, marshall *Island*, dan Tuvalu

yang secara terang-terangan menyatakan keprihatinan tentang pelanggaran HAM di Papua. Pada forum PBB tersebut, Negara-negara kepulauan Pasifik itu menyerukan kebebasan bagi Papua Barat untuk menentukan hasilnya sendiri.

Keberanian dan kepercayaan diri Indonesia dengan mengirimkan diplomat muda sanggup menjawab tuduhan Negara-negara pendukung kemerdekaan Papua dengan tegas dan berani. Nara mengecam tuduhan Negara-negara di kepulauan Pasifik yang mengkritik catatan HAM di Papua. Pernyataan enam kepala Negara itu dilihat Indonesia sebagai motif politik karena mereka tidak mengerti persoalan Papua dan kemudian mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Mereka menggunakan Sidang Majelis Umum PBB untuk mengalihkan perhatian dunia terhadap masalah sosial dan politik di dalam negerinya dan secara tidak langsung telah melakukan intervensi terhadap kedaulatan Negara Indonesia. Pernyataan enam kepala Negara tersebut dibuat untuk mendukung kelompok separatis yang selalu berusaha menciptakan rasa tidak aman di Papua. Selama ini Indonesia telah berusaha membendung internasionalisasi masalah Papua. Hal terakhir yang dilakukan adalah Indonesia berhasil membendung keanggotaan kelompok separatis kemerdekaan Papua menjadi *full member* di dalam forum *Melanesian Spearhead Group*, sementara perbaikan kualitas hidup di Papua terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Joko Widodo.

Adanya peningkatan kapasitas diplomasi Indonesia bukan tanpa alasan, sebagaimana telah di ketahui bahwa selama ini Indonesia menjadi bahan ejekan terkait isu-isu yang terjadi di Papua. Keterlibatan Indonesia di dalam *Melanesian Spearhead Group* memberikan lebih banyak keuntungan daripada kerugian. Mulai dari persamaan budaya

dan kepemilikan jumlah ras Melanesia terbanyak di banding negara-negara kepulauan di Pasifik Selatan, letak geografis yang strategis, tingkat ekonomi Indonesia yang jauh lebih tinggi, serta pengalaman berpolitik Indonesia yang lebih mahir dari pada negara-negara di Pasifik Selatan, menjadikan hal-hal tersebut sebagai tolak ukur bagi Indonesia untuk mendapatkan status *full member* dalam forum *Melanesian Spearhead Group*.

Dengan munculnya berbagai perlawanan dari para pendukung Papua Merdeka, bukan tidak mungkin bagi Indonesia untuk melangkah lebih jauh berperan di kawasan Pasifik Selatan. Kebijakan Indonesia untuk bergabung ke dalam *Melanesian Spearhead Group* tentunya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan yang kemudian melihat lebih banyak keuntungan bagi Indonesia untuk terlibat kedalamnya. Dengan pengalaman berpolitik yang kuat di kawasan Asia Tenggara dan menjadikan ASEAN sebagai lingkaran konsentris politik luar negeri, maka Indonesia memiliki keinginan yang sama untuk memiliki pengaruh yang kuat di kawasan Pasifik Selatan. Dengan menjadi motor penggerak bagi negara-negara kepulauan di Pasifik Selatan, khususnya negara-negara anggota *Melanesian Spearhead Group*, maka akan mempermudah Indonesia untuk merubah dukungan *Melanesian Spearhead Group* terhadap kedaulatan Indonesia terhadap Papua.

Negara dianggap sebagai aktor rasional, meskipun kaum realis sebenarnya takut pada kesalahpahaman orang-orang dalam memandang negara sebagai rasional aktor. Aktor negara harus memaksimalkan segala sumber daya untuk memperkuat pertahanan dalam menyerang atau bertahan apabila berkonflik dengan negara lain. Dalam menggunakan *power* untuk mencapai Kepentingan Nasionalnya, aktor memiliki beberapa metode pengaplikasian power yang digunakan

sesuai dengan situasi yang diperlukan oleh aktor. Indonesia tidak menggunakan *hard power* untuk terlibat lebih dalam ke dalam Pasifik Selatan melalui militer, akan tetapi lebih menggunakan *soft power* melalui cara diplomasi. Yang pertama, adalah dalam berpolitik. Indonesia sebagai negara dengan *middle power* bisa menjadi agen perubahan di dunia internasional. Negara dengan *middle power* atau yang kekuatannya berada di level menengah, justru adalah negara yang bisa berkontribusi besar di dunia internasional. Melihat hal ini, Indonesia berada di posisi lebih tinggi dan memiliki potensi yang lebih untuk mempengaruhi Negara-negara lainnya di wilayah Pasifik Selatan. Kedua, melalui bidang ekonomi.

Seperti yang telah penulis katakan sebelumnya bahwa tingkat ekonomi Indonesia berada jauh lebih tinggi daripada Negara-negara anggota Melanesian seperti Papua Nugini, Fiji, Solomon Island, Vanuatu dan Caledonia Baru. Jika kita kaitkan dengan aktor rasional yang mempertimbangkan untung dan rugi, maka saat ini Indonesia belum mendapatkan keuntungan banyak dari segi ekonomi. Untuk itu, strategi Indonesia adalah dengan banyak memberi saat ini sehingga bisa banyak menuai hasil di kemudian hari. Ketiga adalah melalui budaya, dimana Indonesia memiliki jumlah ras Melanesia terbesar di wilayah Pasifik Selatan. Hal ini menjadikan Indonesia merasa pantas dan sudah seharusnya berada di dalam forum *Melanesian Spearhead Group*. Menurut Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, A.M Fachir pada *The 20th Melanesian Spearhead Group Leaders' Summit* di Honiara “*Since its inception to the MSG in 2011, Indonesia, with its rich Melanesian cultural spread across its five province: Papua Province, West Papua, Maluku, North Maluku, to East Nusa Tenggara, has become an inseparable part of this community and its heritage...Indonesia is not*

only the neighbor that live next door but also a brother that share the same hopes with the people of MSG”, dalam hal ini faktor kedekatan kultural dan geografis lebih ditekankan sebagai alasan Indonesia mengajukan keanggotaan, khususnya sebagai *associate member*, pada *Melanesian Spearhead Group*. Indonesia merasa perlu untuk mewakili dan menjembatani kepentingan sebelas juta warga ras Melanesia pada lima wilayah Melanesia di Indonesia.

Untuk memberikan pengaruh yang kuat di wilayah Pasifik Selatan, maka Indonesia membutuhkan basis peran kepemimpinan yang kuat dan bervisi untuk dapat merangkul negara-negara di Pasifik Selatan untuk menjalin kerjasama, terutama negara anggota *Melanesian Spearhead Group*. Negara-negara tersebut tidak lagi dianggap rival, melainkan sebagai partner untuk kemajuan yang bisa meyumbangkan kemajuan bagi dinamika kawasan. Di sisi lain, Indonesia harus memperhatikan unsur ekonominya. Tingkat ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia, menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. Mengingat bahwa adanya iuran wajib setiap negara anggota *Melanesia Spearhead Group* setiap tahunnya. Indonesia perlu lebih waspada akan adanya kemungkinan diperalat dalam hal ekonomi. Bukan menjadi rahasia lagi bahwa diantara negara-negara anggota Melanesia, Vanuatu menjadi salah satu negara yang memiliki utang di dalam organisasi yang kemudian meminta bantuan negara lain yaitu Papua Nugini untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini lah yang menjadi salah satu hal yang harus tetap di waspandai oleh Indonesia.

Dengan memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi Negara lainnya, Indonesia terus berusaha mendekati satu per satu Negara-negara di Pasifik Selatan untuk melihat Indonesia sebagai Negara yang memiliki andil besar bagi mereka. Kalkulasi untung dan rugi Indonesia

terlibat di dalam *Melanesian Spearhead Group* bukan dengan gratis. Indonesia terus aktif didalam pertemuan-pertemuan Pasifik Selatan dan juga aktif dalam memberikan bantuan karena tentunya Indonesia ingin mendapatkan sesuatu yang besar dari Negara-negara tersebut. Karena Indonesia juga ingin mengembangkan diri meningkatkan kerja sama di kawasan Pasifik untuk memajukan kawasan Timur Indonesia. Pemerintah Indonesia harus menjadikan Kawasan Pasifik sebagai salah satu kawasan yang cukup penting.

Berbagai program dan kerja sama juga harus sudah dirancang dan segera direalisasikan untuk membangun hubungan dengan negara-negara anggota Menalesia. Terkait kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia, Indonesia merasa perlu untuk menggalang dukungan yang lebih banyakn dari dunia internasional. Mengingat bahwa Vanuatu sangat gencar mendukung dan menyuarakan kemerdekaan Papua, maka dengan keterlibatan Indonesia di dalam *Melanesian Spearhead Group* Indonesia ingin mnejadi negara yang berpengaruh sehingga menjadi salah satu cara untuk menggalang dukungan negara-negara Pasifik Selatan untuk meredam pergerakan ULMWP untuk memerdekakan Papua, sehingga Papua akan tetap menjadi harga mati di dalam wilayah Republik Indonesia.